EVALUASI PROGRAM BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI (MAHYANI) DI DESA PUNCAK MANDIRI KECAMATAN SUMALATA KABUPATEN GORONTALO UTARA

ARTIKEL JURNAL

MARCELLIA SIMON LONTENG
NIM. D02420018

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2024

EVALUASI PROGRAM BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI (MAHYANI) DI DESA PUNCAK MANDIRI KECAMATAN SUMALATA KABUPATEN GORONTALO UTARA

Marcellia Simon Lonteng[1], Umar Sako Baderan[2], Sri Lestari Gintulangi[3]
[1,23]Program Studi Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Muhammadiyah Gorontalo. 2024
Email: marcellialonteng@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to evaluate the implementation of the Decent Housing Assistance Program (Mahyani) in Puncak Mandiri Village, Sumalata District, North Gorontalo Regency. The research method used is a qualitative approach with descriptive research type. The data sources of the study include the Village Head, Village Secretary, Village Apparatus, as well as the recipients and non-recipients of the program. Data collection was conducted through observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the implementation of the Mahyani Program in Puncak Mandiri Village still faces several challenges. Although the construction of Mahyani houses has begun, the construction process is still incomplete, and there are shortcomings in the transparency of program implementation by the village government. Furthermore, the main objective of this program, which is poverty alleviation, has not been fully achieved due to budget limitations and dependence on village funds. This study provides important insights for local governments, particularly in enhancing the effectiveness and transparency of social assistance program implementation. Better improvement measures are needed to ensure that assistance programs such as Mahyani can provide maximum benefits to the communities in need.

Keywords: *Assistance, MAHYANI, Program*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni (Mahyani) di Desa Puncak Mandiri, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data penelitian meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Aparat Desa, serta masyarakat penerima program dan yang belum menerima. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Mahyani di Desa Puncak Mandiri masih menghadapi sejumlah tantangan. Meskipun pembangunan rumah-rumah Mahyani telah dimulai, namun proses pembangunan masih belum selesai dan terdapat kekurangan dalam transparansi pelaksanaan program oleh pemerintah desa. Selain itu, tujuan utama program ini, yaitu pengentasan kemiskinan, belum sepenuhnya tercapai karena keterbatasan dana dan ketergantungan pada anggaran dana desa. Penelitian ini memberikan wawasan yang penting bagi pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan efektivitas dan transparansi implementasi program bantuan sosial. Diperlukan langkah-langkah perbaikan yang lebih baik untuk memastikan bahwa program-program bantuan seperti Mahyani dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kata Kunci: Bantuan, MAHYANI, Program

PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Kemiskinan merupakan masalah yang secara signifikan memengaruhi kesejahteraan setiap masyarakat, yang disebabkan oleh pendapatan yang tidak stabil, sumber mata pencarian yang tidak pasti, kurangnya lapangan kerja, dan keterbatasan keterampilan, sehingga

menjadi salah satu indikator ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi hak-hak dasarnya, termasuk hak atas rumah. Pemenuhan hak atas rumah menjadi salah satu aspek yang penting untuk diperhatikan oleh pemerintah, karena kondisi perumahan yang dimiliki oleh masyarakat miskin seringkali tidak memenuhi standar perumahan yang layak huni. Kemiskinan di Indonesia bukanlah hal yang baru, dengan angka kemiskinan yang masih tinggi. Meskipun pemerintah telah melaksanakan berbagai program untuk mengatasi kemiskinan di negara ini, namun tampaknya upaya tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan.

Kemiskinan adalah sebuah masalah yang umumnya dihadapi hampir di semua negara berkembang, terutama di negara-negara yang memiliki populasi padat seperti Indonesia. Kemiskinan merupakan tantangan bersama yang harus diatasi dengan serius, karena ini adalah masalah yang mempengaruhi setiap warga Negara Indonesia. Kepedulian dan kesadaran antar sesama warga diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Masalah kemiskinan cenderung merupakan masalah kebijakan politik yang terkait dengan kebijakan pembangunan secara umum, baik di tingkat nasional maupun lokal.

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kemiskinan, seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Beberapa langkah yang diambil antara lain:

1. Mengurangi beban pengeluaran bagi masyarakat miskin.
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin.
3. Menyelaraskan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Program Rumah Layak Huni merupakan salah satu inisiatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan layanan perumahan yang memenuhi standar hunian yang layak bagi penduduk miskin. Tujuan program ini adalah untuk memperbaiki kualitas hidup mereka, memastikan keberadaan rumah yang layak, serta memberikan kemudahan dalam memperoleh rumah bagi mereka yang kurang mampu. Program bantuan rumah layak huni merupakan bentuk subsidi perumahan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat di Desa Puncak Mandiri, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara. Mayoritas penduduk desa tersebut bekerja sebagai buruh dan petani, di mana sebagian dari mereka belum memiliki rumah atau rumah yang mereka miliki belum memenuhi standar hunian yang layak.

Syarat untuk mendapatkan Hunian Sehat telah diatur dalam Undang-Undang No. 4/1992 tentang perumahan dan pemukiman. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa "setiap warga negara memiliki hak untuk menempati dan/atau memiliki rumah yang layak serta lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur." Masyarakat miskin yang diajukan untuk menerima Program Pembangunan Rumah Layak Huni akan menjadi sasaran yang tepat setelah memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

a. Penerima manfaat memiliki lahan untuk pembangunan rumah.
b. Penerima manfaat memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah.
c. Penerima manfaat memiliki bukti kepemilikan rumah yang tidak memenuhi standar dari segi kesehatan dan keamanan bagi penghuninya.

Melalui program bantuan pembangunan rumah layak huni ini, diharapkan dapat membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, terutama dalam hal memiliki rumah yang layak huni. Kemiskinan umumnya menjadi indikator bahwa masyarakat tidak mampu memperoleh rumah yang memenuhi standar ke layakan hunian. Oleh karena itu, pentingnya peran serius pemerintah

dalam menangani angka kemiskinan sangatlah besar, dan melalui program ini diharapkan keinginan masyarakat miskin untuk memiliki tempat tinggal yang layak dapat terwujud, sebagaimana diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan.

Indikator kemiskinan pada suatu rumah tangga, berdasarkan standar Badan Pusat Statistik (BPS, 2000), dapat dilihat sebagai berikut:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, atau kayu murahan.
3. Tidak memiliki toilet.
4. Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
5. Masyarakat yang tidak memiliki mata pencarian tetap.
6. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari papan yang mudah rusak.
7. Bahan bakar sehari-hari masih menggunakan kayu bakar atau minyak tanah.
8. Masih membutuhkan bantuan zakat dan raskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kepedulian pemerintah untuk menangani masalah kemiskinan diharapkan terlaksana sebagai mana yang telah ditetapkan oleh pemerintah, demikian halnya dengan adanya kebijakan bantuan pembanggunan rumah sederhana layak huni dapat membantu masyarakat Desa Puncak Mandiri Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara yang masih dibawah garis kemiskinan yang memiliki rumah tidak layak huni. Kriteria kepala keluarga yang layak menerima bantuan rumah sederhana layak huni adalah:

1. Memiliki E-ktp/kartu identitas diri yang berlaku.
2. Kepala keluarga/anggota keluarga tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusian.
3. Kehidupan sehari-hari masih memerlukan bantuan pangan untuk penduduk miskin seperti zakat dan raskin.
4. Tidak memiliki aset lain apabila dijual tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup anggota keluarga selama 3 bulan kecuali tanah dan rumah yang ditempati.
5. Memiliki rumah diatas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau ada surat keterangan kepemilikan dari kelurahan/desa atas status tanah.
6. Rumah yang dimiliki dan ditempati adalah rumah tidak layak huni yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial, dengan kondisi sebagai berikut:
   a. Tidak permanen atau sudah rusak.
   b. Dinding dan atap dibuat dari bahan yang muda rusak/lapuk seperti papan, bambu, dan ilalang.
   c. Dinding dan atap sudah rusak sehingga membahayakan keselamatan penghuninya.
   d. Lantai tanah/semen dalam kondisi rusak.
   e. Diutamakan masyarakat berusia lanjut yang sudah tidak bekerja.

Kebijakan memiliki beragam definisi sesuai dengan perspektif para ahli. Menurut Fazri (2003), kebijakan adalah rangkaian konsep pokok dan asas yang menjadi garis besar dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, atau konsep dasar yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kepemimpinan dan cara bertindak. Edi Suharto (2005) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Sementara menurut Eulau & Prewitt (dalam Suharto, 2005), kebijakan adalah ketetapan yang berlaku yang ditandai dengan perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuat maupun yang mematuhinya.

Titmus (dalam Suharto, 2005) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan tertentu yang selalu berorientasi pada masalah dan tindakan. Winarno (2002) mengartikan kebijakan sebagai arah

tindakan yang diambil oleh seorang aktor untuk mengatasi suatu masalah atau persoalan. Sedangkan menurut Ricard (dalam Winarno, 2002), kebijakan adalah serangkaian tindakan yang memiliki konsekuensi bagi mereka yang terlibat sebagai suatu keputusan tersendiri.

Evaluasi berasal dari kata "Evaluation". Kata tersebut diserap ke dalam perbendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal menjadi "evaluasi". Menurut Arikunto dan Abdul Jabar (2004), evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang kinerja suatu hal, yang kemudian informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam pengambilan keputusan.

Ralap Tylor (dalam Arikunto, 2009) juga menggambarkan evaluasi sebagai proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai, baik dari segi apa dan bagaimana pencapaian tersebut terjadi. Sementara menurut Zainal Arifin (2009), evaluasi adalah suatu proses, bukanlah hasil atau produk. Hasil dari kegiatan evaluasi adalah penilaian atas kualitas suatu hal, baik itu berkaitan dengan nilai maupun maknanya. Sedangkan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai penilaian tersebutlah yang disebut sebagai evaluasi.

Terkait dengan evaluasi Program Bantuan Rumah Layak Huni (MAHYANI), telah ada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rira Permata Sari pada tahun 2019. Penelitian ini berjudul "Evaluasi Program Pengembangan Rumah Layak Huni (RLH) Di Kecamatan Kuantan Singingi Mudik Kabupaten Kuantan Singingi". Rumusan masalah dari penelitian ini adalah evaluasi Program Pengembangan Rumah Layak Huni di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi tersebut menghasilkan hasil yang kurang memuaskan. Dari 6 indikator yang dinilai, hanya 1 indikator yang dinilai sudah baik, sedangkan 5 indikator lainnya dinilai kurang baik. Salah satu penyebabnya adalah belum seluruh masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Program Bantuan Rumah Layak Huni agar dapat meningkatkan kepuasan masyarakat penerima bantuan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program tersebut efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak yang nyata bagi mereka yang membutuhkan.

Terdapat penelitian lain yang dilakukan oleh Bambang Winarno pada tahun 2018 dengan judul "Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Belitung". Rumusan masalah penelitian ini adalah mengevaluasi program bantuan Rumah Layak Huni (RLH) dengan fokus pada keberhasilan program dalam mencapai sasaran yang tepat dan waktu yang tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program bantuan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Kabupaten Belitung sudah mencapai sasaran yang tepat, namun masih terdapat kekurangan terkait kejelasan aturan pasca penyerahan bangunan. Kekurangan ini berpotensi menyebabkan penyimpangan dan konflik dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan antisipasi dan tindakan lanjutan untuk mengatasi hal tersebut. Diperlukan kajian atau penelitian lanjutan terkait kebijakan penerima manfaat pasca pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Belitung. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program tersebut memberikan dampak yang berkelanjutan dalam upaya pengentasan kemiskinan di daerah tersebut.

Berdasarkan hasil observasi, Desa Puncak Mandiri adalah salah satu dari 11 desa yang terletak di Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, jumlah penduduk

desa ini mencapai 414 jiwa atau 107 kepala keluarga (KK). Dari jumlah penduduk tersebut, sekitar 50% di antaranya dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Kondisi kemiskinan ini menyebabkan banyak keluarga yang masih belum memiliki rumah layak huni yang dapat memberikan keamanan dan kenyamanan saat mereka berada di rumah. Kondisi ini menjadi perhatian serius dari pemerintah desa, kecamatan, hingga tingkat kabupaten dan provinsi. Untuk mengatasi masalah ini, bantuan diberikan kepada keluarga miskin tersebut dalam bentuk rumah layak huni, yang didasarkan pada kriteria yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur atau peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Berdasarkan data dari Pemerintah Desa Puncak Mandiri tahun 2023, pada tahun 2019 terdapat 16 KK yang menerima program bantuan MAHYANI. Namun, pada tahun 2021, jumlah KK yang menerima program MAHYANI turun drastis menjadi hanya 3 KK. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dalam pelaksanaan program bantuan rumah layak huni di desa tersebut.

Selanjutnya berdasarkan penuturan dari masyarakat penerima bantuan program Mahyani, terungkap bahwa tidak semua pembangunan rumah dalam program ini sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan untuk membangun rumah layak huni. Hal ini terlihat dari pembangunan rumah Mahyani yang tidak selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, serta kondisi bangunan yang tidak sepenuhnya terlengkap. Ada beberapa contoh yang dapat dilihat, seperti beberapa rumah yang tidak dilengkapi dengan pintu dan jendela, sehingga mengakibatkan kurangnya keamanan dan kenyamanan bagi penghuni rumah tersebut. Padahal, rumah-rumah Mahyani tersebut telah diserahkan secara resmi kepada para penerima bantuan. Keadaan ini tentu menimbulkan kekecewaan yang mendalam bagi para penerima, karena rumah yang mereka dapatkan tidak mencapai standar yang diharapkan dan tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang merupakan suatu metode penggambaran data menggunakan kata-kata dan/atau kalimat. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami suatu situasi sosial, peristiwa, peran, interaksi, dan kelompok secara mendalam. Selain itu, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fakta-fakta sesuai dengan masalah yang diteliti, yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian yang telah ditentukan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berusaha untuk menjelaskan fenomena yang diamati, tetapi juga untuk memberikan gambaran yang lengkap dan akurat tentang kondisi yang ada.

Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang dapat diamati. Hal ini berarti bahwa penelitian tersebut fokus pada pengumpulan data yang mendeskripsikan fenomena yang diamati dari sudut pandang partisipan dalam bentuk kata-kata atau ucapan yang mereka sampaikan (Moleong, 2007). Sementara menurut Sugiyono (2012), penelitian jenis deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen), tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara satu variabel dengan variabel lainnya.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengambil data dari beberapa sumber, yang dapat dibagi atas:

1. Data primer, yang merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer

juga dikenal sebagai data asli atau data baru. Dalam penelitian ini, sumber data primer yang akan digunakan adalah: 1) Kepala Desa, 2) Sekretaris Desa, 3) Kepala Urusan, 4) Pendamping Program (TKSK), dan 5) Masyarakat.

2. Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh secara tertulis dan digunakan sebagai bahan pendukung penelitian. Data sekunder akan diperoleh melalui telaah terhadap referensi perpustakaan yang dianggap relevan dengan permasalahan penelitian yang sedang diteliti.

Dalam pengumpulan data penelitian, teknik yang digunakan terdiri dari beberapa cara sebagai berikut:

a) Observasi: Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dengan melakukan pengamatan langsung terhadap situasi atau objek yang menjadi fokus penelitian. Peneliti menggunakan catatan tak berstruktur pada tahap awal yang terbuka, kemudian pada tahap berikutnya, peneliti memberikan perhatian pada sejumlah kategori yang telah dipilih sebelumnya.
b) Wawancara: Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang bersifat terbuka. Pertanyaan-pertanyaan wawancara diajukan kepada sejumlah informan yang dipilih berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian.
c) Dokumentasi: Dokumentasi umumnya digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa catatan-catatan, buku-buku, laporan-laporan, serta dokumen-dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen-dokumen ini digunakan sebagai sumber data tambahan untuk mendukung temuan dalam penelitian.

HASIL PENELITIAN

Desa Puncak Mandiri pada jaman dahulu masih di kenal dengan bukit Monggonito diartikan dengan jenis pohon kayu yakni Maranti. Pada waktu itu kayu Maranti ini hidup dan sebagian besar ada di dusun mandiri. Setelah bertahun-tahun nama bukit Monggonito mulai tidak di sebut lagi dan muncul nama lain yaitu bukit mandiri. Bukit Mandiri muncul dari nama dusun Kasia, dan Desa Kikia dusun Puncak Indah. Pada tahun 2005 di bawa pimpinan Bupati Kabupaten Gorontalo dengan kegiatan acara adat suku Sangihe/Talaud sekaligus pembuatan prasasti Desa Puncak David Mandiri menandakan batas antara 2 desa yakni Kasia dan Kikia. Pada tahun 2008 dalam kepemimpinan Bupati Gorontalo Utara berubah lagi dengan nama Desa Puncak Mandiri dan puncak mandiri dihuni oleh bermacam-macam suku dan etnis.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi Program Bantuan Rumah Layak Huni (Mahyani) di Desa Puncak Mandiri Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara. Adapun yang menjadi pokok masalah yang didapatkan melalui hasil observasi awal dan dituangkan dalam sub bagian bab identifikasi masalah adalah: 1) Penerima Mahyani yang masih terbatas dan tidak mencakup penduduk miskin yang ada di Desa Puncak Mandiri; dan 2) Pelaksanaan pembangunan Mahyani yang 100% tidak selesai;

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari suatu program, dibutuhkan suatu evaluasi. Evaluasi program mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi sebagai hasil dari sebuah kebijakan atau program dibandingkan dengan apa yang diharapkan terjadi setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. Dengan kata lain, evaluasi akan menelaah dampak nyata dari suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Evaluasi ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana suatu program berhasil mencapai hasil yang diinginkan dan apakah program tersebut berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Evaluasi menjadi sangat penting untuk dilakukan dalam suatu program. Tujuan dan sasaran dari suatu program atau kebijakan akan dapat diukur melalui evaluasi sehingga evaluasi disini sebagai tolak ukur seberapa jauh tujuan dan sasaran dari suatu program tersebut telah dicapai. Dalam menilai keberhasilan suatu program, juga perlu dikembangkan beberapa indikator atau kriteria yang menjadi acuan dalam melakukan evaluasi. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pada pelaksanaan program Mahyani itu sendiri, peneliti menggunakan kriteria evaluasi pada penelitian tentang Evaluasi Program Bantuan Rumah Layak Huni (Mahyani) di Desa Puncak Mandiri Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara. Peneliti menggunakan kriteria evaluasi dari Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar (2009), indikator penelitian dan evaluasi program adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program

Dalam evaluasi program, kita melihat seberapa tinggi mutu atau kondisi sesuatu sebagai hasil pelaksanaan program, setelah data yang terkumpul dibandingkan dengan kriteria atau standar tertentu. Joan L. Herman, yang dikutip oleh Farida (2008), mengemukakan definisi program sebagai "segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh". Lebih lengkap lagi, Hasibuan (2006) juga mengungkapkan bahwa program adalah suatu jenis rencana yang jelas dan konkret karena di dalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan. Selain itu, definisi program juga termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa: Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat. Dalam proses pelaksanaan suatu program, dapat berhasil, kurang berhasil, atau bahkan gagal sama sekali apabila ditinjau dari hasil yang dicapai atau outcomes. Hal ini karena dalam proses tersebut turut bermain dan terlihat berbagai unsur yang pengaruhnya bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian sasaran suatu program.

Dalam evaluasi program, kita melihat seberapa tinggi mutu atau kondisi sesuatu sebagai hasil pelaksanaan program, setelah data yang terkumpul dibandingkan dengan kriteria atau standar tertentu. Pelaksanaan program adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, yang berbentuk pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh kebijaksanaan, prosedur, dan sumber daya. Hal ini dimaksudkan untuk membawa suatu hasil guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terkait dengan pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni (Mahyani) yang ada di Desa Puncak Mandiri, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, telah dilakukan penelitian melalui proses wawancara kepada para informan dengan mengajukan 4 (empat) pertanyaan. Standar atau kriteria yang dimaksud adalah bahwa pembangunan Mahyani telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Dimana penerima program ini adalah mereka penduduk di desa yang belum memiliki rumah, tidak mendapatkan bantuan serupa, serta memiliki bidang tanah yang menjadi lokasi pembangunan rumah bantuan tersebut.

Namun, dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan yang berasal dari masyarakat, disampaikan bahwa pembangunan Mahyani belum sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara, terungkap bahwa

pembangunan Mahyani di Desa Puncak Mandiri, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai program bantuan yang berupa pembangunan rumah bagi masyarakat miskin, pembangunan Mahyani seharusnya dilaksanakan secara menyeluruh dan memenuhi standar yang ditetapkan. Pembangunan Mahyani seharusnya dilakukan dengan baik sehingga ketika diserahkan kepada masyarakat penerima bantuan, kondisi rumah sudah selesai sesuai standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan oleh pihak yang memiliki keahlian untuk menilai apakah program tersebut telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pada Pasal 28 Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan bahwa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Tim Pembangunan Mahyani Sehat bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penarikan dana, pengadaan barang, dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Tim Pembangunan Mahyani Sehat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebelum penyerahan program Mahyani kepada masyarakat penerima bantuan, telah dilakukan pemeriksaan oleh tim yang ditunjuk untuk memastikan bahwa pembangunan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Temuan dari observasi awal menunjukkan bahwa ada keluhan dari masyarakat bahwa beberapa pembangunan Mahyani belum selesai saat diserahkan kepada mereka. Hasil wawancara juga menegaskan bahwa beberapa informan mengkonfirmasi bahwa pembangunan Mahyani memang belum selesai, namun tetap diserahkan kepada masyarakat penerima. Hal ini mungkin terjadi karena batas waktu pembangunan telah habis, sehingga Pemerintah Desa, yang bertanggung jawab atas program tersebut, memutuskan untuk menyerahkannya kepada masyarakat. Kepala Desa, sebagai Ketua Tim pembangunan Mahyani di desa, bersama dengan aparat dan anggota Tim yang telah dibentuk, menegaskan bahwa pembangunan Mahyani akan tetap diselesaikan hingga selesai sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini juga ditegaskan oleh informan lainnya, bahwa meskipun diserahkan kepada masyarakat dalam kondisi belum selesai, mereka akan tetap menunggu penyelesaian pembangunan dari program Mahyani tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan observasi, terbukti bahwa pelaksanaan pembangunan program Mahyani belum mencapai tingkat keseluruhan yang selesai 100%. Meskipun pemerintah desa, bersama perangkat desa dan masyarakat, menyatakan bahwa pembangunan Mahyani telah memenuhi kriteria dan standar yang ditetapkan, namun ketika ditanya terkait penyerahan Mahyani yang belum selesai, pemerintah desa menyatakan bahwa pembangunan akan tetap dilanjutkan hingga selesai. Terkait dengan keluhan dari masyarakat desa, terungkap bahwa pembangunan Mahyani oleh pelaksana tidak sepenuhnya selesai saat diserahkan kepada masyarakat. Sebagian rumah Mahyani yang diserahkan bahkan belum dilengkapi dengan pintu dan jendela, sehingga masyarakat merasa terganggu dan harus mencari cara untuk menutupi ruang-ruang yang belum lengkap tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian antara klaim pemerintah desa dan realitas yang dialami oleh masyarakat terkait pelaksanaan program Mahyani.

2. Tingkat ketercapaian tujuan program

Dalam evaluasi program, pelaksana ingin mengetahui sejauh mana tujuan program telah tercapai, dan jika tujuan tersebut belum tercapai sesuai dengan yang ditentukan, maka pelaksana ingin mengetahui di mana letak kekurangannya dan apa penyebabnya.

Pada Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan bahwa tujuan dari Pembangunan Mahyani bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan RTM serta untuk mengentaskan kemiskinan. Untuk menilai apakah program bantuan pembangunan Mahyani di Desa Puncak Mandiri telah mencapai tujuan yang ditetapkan, peneliti melakukan wawancara dengan para informan yang telah ditunjuk untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut mengenai tingkat pencapaian program bantuan Mahyani tersebut.

Program Mahyani juga memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi, tidak hanya secara fisik tetapi juga sebagai tempat perlindungan dan pusat kegiatan yang penting bagi pembinaan anggota keluarga. Melalui wawancara dengan Kepala Desa Puncak Mandiri, yang diidentifikasi dengan inisial AG, didapatkan hasil bahwa program bantuan Mahyani di desa telah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat. Pendapat ini juga dikuatkan oleh beberapa perangkat desa seperti Kepala Urusan, Kepala Dusun, dan Pendamping Desa (TKSK), yang menyatakan bahwa program Mahyani telah berhasil mengurangi angka kemiskinan di desa tersebut. Dalam konteks pencapaian tujuan implementasi kebijakan program bantuan rumah layak huni yang dijalankan oleh pemerintah, tujuannya pada dasarnya adalah untuk mengatasi kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan. Pemenuhan tempat tinggal di sini menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam mengatasi kemiskinan.

Terdapat perbedaan pandangan di antara informan-informan yang terlibat dalam penelitian ini. Informan dengan inisial WY, menyatakan bahwa program bantuan Mahyani belum berhasil mengurangi tingkat kemiskinan di Desa Puncak Mandiri. Pandangan ini juga didukung oleh sejumlah warga masyarakat yang diwawancarai, yang berpendapat bahwa program bantuan Mahyani belum efektif dalam menekan tingkat kemiskinan penduduk. Salah satu masalah yang diidentifikasi adalah ketidakmerataan dalam penerimaan program Mahyani, yang menyebabkan persepsi bahwa program tersebut belum berhasil mengurangi kemiskinan. Untuk memahami lebih lanjut apakah program ini telah diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan apakah pelaksanaannya transparan, peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah informan dalam penelitian ini.

Keterangan dari Kepala Desa Puncak Mandiri menegaskan bahwa pelaksanaan program bantuan Mahyani dilakukan secara transparan. Menurutnya, pemerintah desa telah melakukan pelaksanaan program dengan terbuka, sehingga semua warga mengetahui siapa yang menerima bantuan dan siapa yang belum. Informasi ini juga didukung oleh pandangan informan lain yang juga merupakan Kepala Desa Puncak Mandiri. Mereka menyatakan bahwa program bantuan Mahyani dilakukan secara transparan baik dalam penentuan penerima maupun pelaksanaan kegiatan, sehingga masyarakat dapat melihat langsung bagaimana program tersebut dijalankan.

Sepertinya terdapat perbedaan pandangan antara pemerintah desa dan masyarakat terkait transparansi dalam pelaksanaan program bantuan Mahyani di Desa Puncak Mandiri. Meskipun pemerintah desa menyatakan bahwa program tersebut dilakukan secara transparan, namun pandangan masyarakat menunjukkan sebaliknya. Masyarakat merasa bahwa penentuan penerima bantuan belum transparan dan kriteria yang ditetapkan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Selain itu, pelaksanaan pembangunan Mahyani juga dipertanyakan karena tidak

memenuhi standar yang ditetapkan ketika diserahkan kepada masyarakat penerima. Dengan adanya perbedaan pandangan ini, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk memahami secara lebih mendalam tentang pelaksanaan program bantuan Mahyani dan menanggapi kekhawatiran yang diungkapkan oleh masyarakat.

Memahami keterbatasan anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan program bantuan Mahyani merupakan hal yang penting. Meskipun program ini sangat diharapkan oleh masyarakat miskin, namun harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada di desa. Penjelasan yang diberikan oleh kepala desa dan perangkat desa lainnya menunjukkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif dalam menggulirkan program ini. Dengan demikian, tidak semua masyarakat miskin yang belum memiliki rumah akan dapat menerima bantuan tersebut karena keterbatasan anggaran. Hal ini menunjukkan perlunya perencanaan yang matang dan alokasi sumber daya yang tepat untuk mencapai dampak yang maksimal dari program bantuan Mahyani.

Dari hasil penelitian tersebut, terlihat bahwa program pembangunan Mahyani belum mampu mencapai semua masyarakat miskin di Desa Puncak Mandiri. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran program yang bergantung pada dana desa. Dengan alokasi anggaran yang terbatas, tidak semua penduduk miskin dapat memperoleh bantuan Mahyani setiap tahun. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap program ini untuk menentukan strategi yang lebih efektif dalam mengalokasikan sumber daya dan memastikan bahwa program ini dapat mencapai sasaran yang ditetapkan untuk mengurangi kemiskinan di Desa Puncak Mandiri.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Program Bantuan Rumah Layak Huni (Mahyani) di Desa Puncak Mandiri, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Beberapa temuan menunjukkan bahwa pembangunan Mahyani belum selesai secara menyeluruh, namun sudah diserahkan kepada masyarakat penerima. Selain itu, pelaksanaan pemberian bantuan dinilai belum transparan oleh sebagian masyarakat, dan tujuan program untuk mengentaskan kemiskinan juga belum tercapai sepenuhnya. Keterbatasan dana, yang hanya bergantung pada dana desa, menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan tidak semua masyarakat desa bisa mendapatkan bantuan ini. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam terhadap program ini untuk mengidentifikasi masalah yang ada dan menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program tersebut.

Saran

Dengan adanya hasil simpulan atas penelitian diatas, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

a. Penegasan dan Penerapan Standar Pelaksanaan: Pemerintah desa harus memastikan bahwa pembangunan Mahyani selesai dengan standar yang ditetapkan sebelum diserahkan kepada masyarakat. Pelaksana pembangunan harus ditegaskan kewajibannya untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan komitmen yang telah disepakati. Jika diperlukan, sanksi harus diberlakukan kepada pelaksana yang tidak memenuhi kewajiban mereka.
b. Pengelolaan Anggaran yang Lebih Efekti: Pemerintah desa perlu mencari alternatif anggaran lain yang dapat digunakan untuk mendukung program

pembangunan Mahyani. Hal ini dapat melibatkan peninjauan kembali alokasi dana desa, mencari sumber dana dari lembaga atau program lain, atau mengajukan proposal untuk bantuan tambahan dari pihak lain. Dengan mengoptimalkan pengelolaan anggaran, lebih banyak rumah dapat dibangun dan lebih banyak masyarakat miskin dapat mendapatkan manfaat dari program Mahyani.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan program pembangunan Mahyani dapat berjalan dengan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Desa Puncak Mandiri dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. (2009). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. PT Asdi Mahasatya: Jakarta

Arikunto, S. dan Jabar. (2004). Evaluasi Program Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara

Bambang Winarno. (2018). Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Belitung

Farida, Yusuf. (2008). Evaluasi Program. Jakarta: Rineka Cipta.

Fazri, Zul, EM. (2003). Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.Jakarta: Difa Publisher.

Moleong, Lexy J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penangulangan Kemiskinan Pada Pasal 3

Rira Permata Sari. (2019). Evaluasi Program Pengembangan Rumah Layak Huni (RLH) Di Kecamatan Kuantan Singingi Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

Subarsono. (2005). Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta.

Suharto, Edi. (2010). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 28A dan 28H

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan

Wahab, Solichin Abdul. (2012). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. (2002). Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Presindo

Zainal, Arifin. (2009). Evaluasi Pembelajaran. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.